



**RANCANGAN
PERATURAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATILOR
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);

19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);

24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
28. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
30. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
31. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 36);
32. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 37);

33. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
34. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2022 Nomor 4);
36. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
37. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Loka Mukti Jatilor (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 8);
39. Peraturan Desa Jatilor Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa Loka Mukti Jatilor (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 9);
40. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2022 Nomor 2);
41. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jatilor Tahun 2023 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATILOR TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.450.000.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.450.000.000,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	00,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
- a. APB Desa;
 - b. Daftar Penyertaan Modal;
 - c. Daftar Dana Cadangan;
 - d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal

SEKRETARIS DESA JATILOR,

SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATILOR
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
41	Pendapatan Asli Desa	1.062.810.000,00	
42	Transfer	1.383.509.000,00	
43	Pendapatan Lain	3.681.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.450.000.000,00	
5	BELANJA		
51	Belanja Pegawai	861.266.940,00	
52	Belanja Barang dan Jasa	784.719.187,00	
53	Belanja Modal	723.933.000,00	
54	Belanja Tidak Terduga	80.080.873,00	
	JUMLAH BELANJA	2.450.000.000,00	
	SELISIR PLUS / (DEFISIT)	-	
6	PEMBIAYAAN		
61	Penerimaan Pembiayaan	-	
611	Saluran LPA Tahun Sebelumnya	-	
62	Pengeluaran Pembiayaan	-	
622	Penyertaan Modal Desa	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	-	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jatilor, 25 Oktober 2023
KEPALA DESA

PURWADI

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATILOR
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		PENDAPATAN		
41		Pendapatan Asli Desa	1.062.810.000,00	
42		Transfer	1.383.509.000,00	
43		Pendapatan Lain	3.681.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.450.000.000,00	
5		BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.336.981.127,00</u>	
11		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.162.329.940,00	
1101		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.610.000,00	
1101	51	Belanja Pegawai	47.610.000,00	
1102		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	263.284.584,00	
1102	51	Belanja Pegawai	263.284.584,00	
1103		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.012.356,00	
1103	51	Belanja Pegawai	4.012.356,00	
1104		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	150.063.000,00	
1104	52	Belanja Barang dan Jasa	150.063.000,00	
1105		Penyediaan Tunjangan BPD	30.360.000,00	
1105	51	Belanja Pegawai	30.360.000,00	
1106		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam dan Perlengkapan dll)	50.000.000,00	
1106	52	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1107		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	78.000.000,00	
1107	52	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
1108		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.000.000,00	
1108	52	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1190		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	510.000.000,00	
1190	51	Belanja Pegawai	510.000.000,00	
1191		Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	
1191	51	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
12		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	46.250.000,00	
1201		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	43.250.000,00	
1201	53	Belanja Modal	43.250.000,00	
1202		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	
1202	53	Belanja Modal	3.000.000,00	
13		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.300.000,00	
1301		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	
1301	52	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1302		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	7.500.000,00	
	52	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1305		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.400.000,00	
1305	52	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
14		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	80.160.000,00	
1401		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.000.000,00	
1401	52	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1402		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	12.140.000,00	
1402	52	Belanja Barang dan Jasa	12.140.000,00	
1403		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	
1403	52	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1404		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.120.000,00	
1404	52	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	
1405		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.900.000,00	
	52	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1406		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.500.000,00	
1406	52	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1407		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Laporan Tahunan Kepada Masyarakat	2.500.000,00	
1407	52	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1408		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.500.000,00	
	52	Belanja Barang dan Jasa	10.076.000,00	
	53	Belanja Modal	12.424.000,00	
1410		Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi Pilkades	10.000.000,00	
	52	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
15		Sub Bidang Pertanian	35.941.187,00	
1506		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	35.941.187,00	
1506	52	Belanja Barang dan Jasa	35.941.187,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>791.879.000,00</u>	
21		Sub Bidang Pendidikan	68.550.000,00	
2101		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	68.550.000,00	
2101	52	Belanja Barang dan Jasa	68.550.000,00	
22		Sub Bidang Kesehatan	60.029.000,00	
2202		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	35.000.000,00	
2202	52	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2204		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.029.000,00	
2204	52	Belanja Barang dan Jasa	25.029.000,00	
23		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	658.300.000,00	
2307		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	4.500.000,00	
2307	52	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2311		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	147.800.000,00	
2311	53	Belanja Modal	147.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2312		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	181.000.000,00	
2312	53	Belanja Modal	181.000.000,00	
2314		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	325.000.000,00	
2314	53	Belanja Modal	325.000.000,00	
26		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	
2601		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000,00	
2601	52	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2601	53	Belanja Modal	2.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>154.059.000,00</u>	
31		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.200.000,00	
3102		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.000.000,00	
3102	52	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3103		Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	10.000.000,00	
3103	52	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3107		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan	4.200.000,00	
3107	52	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
32		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	85.000.000,00	
3203		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	
3203	52	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3290		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	70.000.000,00	
3290	52	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
33		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.859.000,00	
3304		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	8.859.000,00	
3304	53	Belanja Modal	8.859.000,00	
3306		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	
3306	52	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
34		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.000.000,00	
3402		Pembinaan KMD/LPM/LPMD	4.500.000,00	
3402	52	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3403		Pembinaan PKK	20.000.000,00	
3403	52	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3490		Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	5.000.000,00	
3490	52	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3491		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.500.000,00	
3491	52	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>87.000.000,00</u>	
42		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	24.000.000,00	
4201		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	24.000.000,00	
4201	52	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
43		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	57.000.000,00	
4301		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	
4301	52	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4302		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4302	52	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4303		Peningkatan Kapasitas BPD	21.000.000,00	
4303	52	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4399		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.000.000,00	
4399	52	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
46		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.000.000,00	
4602		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.000.000,00	
4602	52	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	80.080.873,00	
51		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	880.873,00	
5101		Kegiatan Penanggulangan Bencana	880.873,00	
5101	54	Belanja Tidak Terduga	880.873,00	
5300		Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	
5300		Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000,00	
5300	54	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.450.000.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	-	
6		PEMBIAYAAN		
61		Penerimaan Pembiayaan	-	
611		Silpa Tahunan sebelumnya	-	
62		Penggunaan Pembiayaan	-	
621		Pembiayaan Modal Desa	-	
		PEMBIAYAAN NETTO	-	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	

Jatilor, 25 Oktober 2023

KEPALA DESA

PURWADI